

Tidak Hanya Bibit Unggul, Petani Bulukumba Juga Dibantu Pembersihan Lahan



Sumber gambar:

<https://sulselprov.go.id/post/tidak-hanya-bibit-unggul-petani-bulukumba-juga-dibantu-pembersihan-lahan>

Pemerintah Kabupaten Bulukumba terus memacu program bibit unggul untuk beberapa varietas buah unggul. Belajar dari tahun tahun sebelumnya, warga atau petani kesulitan mengganti tanamannya dengan bibit unggul di kebunnya karena kendala pembersihan lahan. Untuk membersihkan dan menggarap lahan untuk kemudian ditanami bibit unggul, tidak bisa mengandalkan tenaga manusia secara manual, akan tetapi harus dibantu dengan alat berat seperti eskavator.

Olehnya itu, memasuki tahun 2024 ini, Pemda melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menganggarkan bantuan bibit unggul sekaligus bantuan pembersihan lahan menggunakan alat berat. "Jadi ini paket komplit, dibantu bibit unggul juga dibantu pembersihan lahannya," kata Kabid Hortikultura dan Perkebunan Iwan Setiawan, Jumat 26 April 2024.

Dikatakan program ini untuk mewujudkan model pertanian perkebunan yang monokultur sehingga lebih terukur dan mudah pemeliharaannya. Petani yang mendapatkan bantuan bibit harus mengikuti skema atau model pertanian yang direkomendasikan yaitu Good Agriculture Practices (GAP).

GAP merupakan sebuah teknispenerapan sistem sertifikasi proses produksi pertanian yang menggunakan teknologimaju ramah lingkungan dan berkelanjutan, sehingga produk panen aman dikonsumsi,kesejahteraan

pekerja diperhatikan dan usahatani yang memberikan keuntungan ekonomi bagi petani.

ASEAN-GAP sendiri menekankan terhadap empat komponen yaitu (1) keamanan konsumsi pangan; (2) pengelolaan lingkungan dengan benar; (3) keamanan, kesehatan dan kesejahteraan pekerja lapang; (4) jaminan kualitas produk dan traceability produk.

Saat ini, lanjutnya sudah dalam tahap verifikasi lahan. Sudah ada sekitar 153 hektar lahan petani yang tersebar di beberapa kecamatan yang bersedia diolah lahannya untuk menjadi perkebunan monokultur. "Lahan itu akan jadi kebun percontohan yang memiliki prospek ekonomi yang besar," kata Iwan Setiawan.

Adapun anggaran yang diperuntukkan untuk program bibit unggul dan pengolahan lahan, masing masing dialokasikan sebesar Rp 1 milyar. Bibit unggul yang disiapkan Nangka Madu sebanyak 5100 pohon, Pala sebanyak 5000 pohon dan sukun 500 pohon.

Untuk diketahui, Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf juga saat ini mengolah lahan kebun nya sendiri untuk perkebunan bibit unggul, baik di Bulukumba maupun di Kabupaten Sinjai. Tujuannya agar memperlihatkan dan memberikan motivasi kepada warga Bulukumba untuk melakukan reformasi pertanian dengan mengganti tanaman yang tidak produktif dengan tanaman bibit unggul. Andi Utta sapaan akrab bupati juga melalui dan CSR perusahaannya juga sudah membagi ratusan ribu bibit unggul kepada masyarakat.

Selain itu, Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, telah mengambil langkah progresif dengan melaksanakan program Inseminasi Buatan (IB) di Kecamatan Cina, Kabupaten Bone. Program ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan populasi ternak, khususnya sapi Bali dan Simental, yang merupakan dua jenis sapi utama di desa tersebut.

Pada Jumat, 19 April 2024 ia berkunjung dan melakukan inseminasi buatan di Desa Kanco. Inseminasi buatan yang dilakukan antara indukan simental dan bibit limosine ini diharapkan dapat menghasilkan keturunan dengan kualitas genetik yang lebih baik.

Pelaksana IB di desa ini, Syamsir menyatakan optimisme bahwa bantuan provinsi dalam penyediaan strow (bibit) akan memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas ternak di Desa Kanco. "Ini strow (benih) dari provinsi. Mudah-mudahan di provinsi bisa memenuhi kebutuhan masyarakat," sebutnya.

Adapun Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulawesi Selatan, Nurlina Saking, menambahkan bahwa Desa Kanco memiliki populasi sapi betina sebanyak 1.200 dari total 17.000 di Kecamatan Cina. "Program pelayanan kesehatan hewan, termasuk vaksinasi penyakit mulut dan kuku, serta pelaksanaan inseminasi buatan di sini berjalan dengan cukup baik," ujar Nurlina.

Selain itu, Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin menekankan pentingnya dukungan pengetahuan dan pelatihan dalam menyediakan pakan yang berkualitas untuk ternak. Dia meminta Dinas Peternakan Sulsel untuk segera menyelenggarakan pelatihan pembuatan pakan ternak, mengingat bahan-bahan pakan yang melimpah namun belum termanfaatkan secara maksimal. "Bu Kadis berikan pelatihan secepatnya untuk memanfaatkan potensi pakan yang ada, agar program ketahanan pangan ini dapat berjalan dengan sukses," kata Bahtiar Baharuddin, menanggapi masukan dari peternak dan penyuluh peternakan.

Program inseminasi buatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan populasi ternak, tetapi juga menjadi pilar penting dalam upaya peningkatan ketahanan pangan di Sulawesi Selatan.

Sumber Berita :

1. <https://sulselprov.go.id/post/inovasi-peternakan-di-cina-bone-inseminasi-buatan-dikuatkan-dengan-ketersediaan-pakan> 20 April 2024.
2. <https://sulselprov.go.id/post/tidak-hanya-bibit-unggul-petani-bulukumba-juga-dibantu-pembersihan-lahan> 26 April 2024.

Catatan :

1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 47 yang menyatakan:
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

- c. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - d. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - 1) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - 2) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - f. Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
 - g. Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
 - h. Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
 - i. Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
 - j. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
2. Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;

- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.